

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendrawan, 2004, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Edisi Kedua, Balai Pustaka Jakarta.
- Lubis , Irwansyah, Anhar dan M. Zuhdi, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandarlampung, Universitas Lampung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, H.R, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Cetak ke-9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sanjaya, I. M, 2019, *Pembangunan Kota Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasi Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Pertanahan; Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Medua Group, Jakarta.

Setyawan Salam, Dharma, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan , Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta.

S. Hutagalung, Aries, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*, Jakarta.

Soekanto, Soejorno, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofi Puspasari dan Sutaryono, 2017, *Integrasi Agraria–Pertanahan Dan Tata Ruang*, STPN Press, Yogyakarta.

Sudarsono, B, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasinya pada Tata Ruang*, UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2013, *Method Penelitian Hukum*, Harvarindo, Jakarta.

Sutrisno, S, 2018, *Pengembangan Properti: Konsep, Teori, dan Praktik*, Erlangga, Jakarta.

Zulkaidah, 2011, *Tanggung Jawab Sosial*, Lajnah Pentashihan, Jakarta.

B. Sumber Tesis dan Jurnal

Agustina, M. S. A, 2021, *Peran Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Izin Membangun Perumahan Diatas Tanah Pertanian Yang Subur*, 7(2), Jurnal Justitiabelen, Universitas Tulungagung,.

Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K, 2020, *Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Aulia, S. D, 2020, *Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*, UIN AR-RANIRY, Banda Aceh.

- Aulia, Rizky, 2017, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Asra, A, 2019, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Perdesaan, Vol. 3 No 2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fauzi, Galih Husain., Ermanto Fahamsyah, 2018, *Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun*, Jurnal Hukum Adigama: Volume 1 Nomor 2, Universitas Taruma Negara, Jakarta.
- Intan Mulia Sari, T. M. Nur, Zurani, 2017, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Tambak Di Desa Beurawang Kecamatan Jeumpakabupaten Bireuen*, Jurnal S. Pertanian, Universitas Al Muslim, Volume 1 Nomor 2.
- Jannah, R., Eddy, B. T., & Dalmiyatun, T, 2017, *Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Agrisocionomics, Vol 1 No.1.
- Komang Darman, 2020, *Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan*. Belom Bahadat, 10 (02).
- Lukas Rezky Renyut, dkk, 2018, *Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bitung)*, Jurnal Spasial, Vol. 5. No.1.
- Made Sudarma, dkk, 2024, *Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Bali*, Universitas Udayana, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 8 Nomor 1.
- Nurhidayati, S, 2015, *Kajian Potensi Lahan Sawah untuk Pengembangan Pertanian di Kabupaten Subang*, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Universitas Tanjungpura, Kalimantan.
- Octavianti, Y. E., & Nurikah, N, 2021, *Analisis efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap ketahanan pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang*, Vol 1(1), Jurnal Tugas Akhir, Yustisia Tirtayasa.

M.Hadjon, Philipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia, Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII.

-----, 2012, *Kebutuhan Hukum akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, Di dalam Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan dan Data Batas –Batas Wewenang Pemerintah*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Nomor 3.

-----, 2005, *Introduction to Indonesian Administrative Law*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Prabowo, S. A., Kamil, M. I., & Mauludin, N. A, 2023, *Pelaksanaan Pelayanan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram)*, Unizar Recht Journal (URJ), Mataram.

Putri Darmawan Charles, dkk, 2017, *Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu*, Jurnal Hukum, Vol 8, No 2, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya.

Rahardjo, Satjipto, 2015, *Teori Hukum Progresif dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 22 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Winarto, Ahmad Adi, 2008, *Tanggung Jawab Developer Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Bidang Perumahan Di Pati*, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Sumber Internet

Admin, Badan Pusat Statistika Padang Pariaman: *Luas Lahan Sawah Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2021*, <https://padangpariamankab.bps.go.id/indicator/53/294/1/luas-lahan-sawah-irigasi-menurut-kecamatan.html>, dikunjungi pada tanggal 25 April 2024 jam 20.30.

Admin, Badan Pusat Statistika Padang Pariaman: *Luas Lahan Sawah Non Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2019–2021*, <https://padangpariamankab.bps.go.id/indicator/53/295/1/luas-lahan-sawah-non-irigasi-menurut-kecamatan.html>, dikunjungi pada tanggal 25 April 2024 Jam 20.30.

Admin, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) melalui: <https://ptsp.pariamankota.go.id/> , dikunjungi pada tanggal 18 Juli 2024 Jam 20.30.

Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, diakses pada jam 14.20 WIB tanggal 6 Mei 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Pemberian Insentif dan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Upaya Dalam Menahan Laju Alih Fungsi Lahan*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4532/pemberian-insentif-dan-penetapan-lahan-sawahdilindungi-menjadi-upaya-dalam-menahan-laju-alih-fungsi-lahan>, diakses 29 Juni 2024 pukul 20.12.

D. Sumber Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang.
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi.
13. Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040.
15. Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/ 2022 tentang Penyelesaian Ketidak Sesuaian Lahan Sawah Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, Dan/Atau Hak Atas Tanah.

